



**PENETAPAN**

Nomor 0512/Pdt.P/2016/PA.Mtr

الرَّجِيءُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul. Aziz bin Ibrahim**, tempat lahir di Ampenan tanggal 04 Juni 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan M. Ruslan Lingkungan Bintaro Jaya RT.005 RW. 048 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon I”**

**Yuliani binti Dahmar**, tempat lahir di Ampenan tanggal 14 Juni 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Ruslan Lingkungan Bintaro Jaya RT.005 RW. 048 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 0512/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Agustus 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hlm 1 dari 5 hlm. Penetapan No 0512/Pdt.P/2016/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah di Lingkungan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Dahmar, dan saksi nikah masing-masing bernama: Hasan dan Hariandi dengan mas kawin berupa Air Zam-Zam tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama : Gajali, Laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak dating menghadap dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut

*Hlm 3 dari 5 hlm. Penetapan No 0512/Pdt.P/2016/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0512Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 11 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000;  
( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam,SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Safruddin A.Gani,SH., dan Drs. Hafiz, MH.sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Uswatun Hasanah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H. Abd. Salam, SH.MH.

H. Safruddin, A.Gani, SH..

Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Uswatun Hasanah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Materai         | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp.186.000,-

*(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

***Hlm 5 dari 5 hlm. Penetapan No 0512/Pdt.P/2016/PA.Mtr***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)